

IMPLEMENTASI PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PUTRA-PUTRI PAPUA (P5) ASAL KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Ibrahim Kristofol Kendi*

e-mail : gattusokendi@gmail.com

Administrasi Perkantoran FISIP UNCEN

Abstrak: Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai program pemberdayaan masyarakat dalam bidang sumber daya manusia yang digalang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P-5) Asal Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tentang Program P-5 ini nampak pada kelanjutan program tersebut melainkan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi peserta P-5 tersebut. Selain itu tanggapan pemerintah selain itu tanggapan kelompok sasaran cukup beragam, kelompok yang memberikan dukungan adalah mereka yang menikmati Program tersebut sedangkan yang tidak memberi dukungan adalah mereka yang dirugikan. Prosentase ketidakkulusan peserta didik yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa kesediaan SDM untuk mencarry out program P-5 kurang maksimal terutama kualitas guru pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Sumber daya pendukung berupa Alokasi dana Otonomi Khusus untuk membiayai Program P-5 sebesar Rp. 39.726.415.381,- dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Program P-5 di kendalikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini jelas terdapat kejanggalan dalam hal tugas pokok dan fungsi dari OPD tersebut. Idealnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Penelitian, Pengembangan, Putra dan Putri

Abstract : This paper is a result of research on community empowerment program in the field of human resources raised by the Local Government of Jayapura Regency through Search and Development Program Potency of Putra-Putri Papua (P-5) Origin of Jayapura Regency of Papua Province. The method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the seriousness of Jayapura District Government regarding P-5 Program is visible in the continuation of the program but prepares employment for P-5 participants. In addition, the government's response in addition to the target group's response is quite diverse, the groups that provide support are those who enjoy the Program while those who do not provide support are those who are harmed. The high percentage of non-graduation of these students shows that the willingness of human resources to obtain out of P-5 program is not maximal especially the quality of teachers in junior high and high school / vocational high school. Supporting resources in the form of Special Autonomy Fund Allocation to finance the P-5 Program of Rp. 39.726.415.381, - and tend to increase from year to year. The P-5 program is controlled by the Regional Personnel Board of Jayapura Regency. It is clear there are peculiarities in terms of basic tasks and functions of the OPD. Ideally the responsibility of the Office of Education and Culture of Jayapura Regency.

Keyword: Implementation, Program, Search, Development, Sons and Daughters

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (3) memberikan penekanan khusus kepada masyarakat yang terisolir untuk mendapatkan layanan pendidikan secara khusus yakni "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selanjutnya pasal (5) memberikan keleluasaan bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh jenjang pendidikan sepanjang yang bersangkutan memiliki kemauan dan kemampuan untuk meraihnya. Dalam ayat itu dikatakan "Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat".

Pasal 3 butir (e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat disebutkan strategi dan kebijakan percepatan pembangunan khu-

susnya di bidang pendidikan dilakukan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh kampung untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk menterjemahkan kebijakan sebagaimana disebutkan diatas pemerintah berupaya melakukan inovasi layanan pendidikan yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak menikmati pelayanan tersebut. Salah satu upaya pemerintah tersebut direalisasikan melalui Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia dengan memperkenalkan Guru SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)). Tujuan Program SM3T ini adalah *Pertama* : membantu daerah 3T dalam mengatasi masalah pendidikan, terutama kurangnya tenaga pendidik. *Kedua* : memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil, memecahkan masalah

pendidikan dan bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa serta memiliki jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T. *Ketiga*, menyiapkan calon pendidikan yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T. *Keempat* : mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini meliputi, *Pertama*, melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat. *Kedua* : mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah. *Ketiga* : melakukan kegiatan ekstra kurikuler. *Keempat* : membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah. *Kelima* : melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah 3T. *Keenam*, melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Pemerintah Provinsi mengamanatkan bahwa “Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang jalur dan jenis pendidikan di Provinsi Papua”.

Untuk merespon kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan Orang Asli Papua khususnya sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan 30% Dana Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari 80% Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Perdasus No. 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Penerimaan dan Pembagian Keuangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kerangka regulasi ini mengubah alokasi dana Otsus yang semula 60% untuk provinsi dan 40% untuk kabupaten/kota, menjadi 20% untuk provinsi dan 80% dialokasikan kepada kabupaten/kota dimana format penggunaannya dan pertanggungjawabannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah kabupaten/kota untuk mendesainnya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura merespon kebijakan sebagaimana disebutkan diatas dengan menghadirkan sebuah model kebijakan afirmasi yang diberi nama “**Program Penelusuran Dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) Asal Kabupaten Jayapura Provinsi Papua** yang dikhususkan bagi orang asli Kabupaten Jayapura dalam berbagai jenjang pendidikan. Program tersebut dilakukan dengan metode perekrutan melalui tahap seleksi yang cukup ketat untuk mejaring putra-putri sentani yang dianggap layak menempuh pendidikan di luar papua, baik di tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Sumber pendanaan program ini berasal dari Dana Otonomi Khusus.

Kebijakan pengembangan SDM melalui program P-5 tersebut telah banyak memberi dampak perubahan yang cukup baik terhadap pengembangan sumber

daya manusia khususnya orang asli Kabupaten Jayapura namun dalam implementasi kebijakan tersebut, masih belum mencapai titik sasaran karena bersifat sporadik dan tidak proposional serta beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, yakni apakah kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat, apakah ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana untuk *carry out* kebijakan tersebut secara efektif, apakah implementor memiliki kecakapan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan program P-5 serta kesesuaian program ini dengan organisasi penyelenggaran (struktur birokrasi) agar tidak terciptanya *bireuocratic fregmentation* untuk menciptakan efektivitas penyelenggaraan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneropong implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura melalui Program P-5. Metode kualitatif yang difokuskan padapelaksanaan kebijakan dimaksud. Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada isu-isu kebijakan publik yang difokuskan Implementasi Program Pemberdayaan Putra-Putri Papua Asli Kabupaten Jayapura. Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Jayapura tepatnya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat sebagai kelompok sasaran, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan birokrat yang menangani secara langsung Program Penelusuran Dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) Asal Kabupaten Jayapura. Teknik pengumpulan data dengan interview/wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan analisa sebelum di lapangan, analisa data selama di lapangan dan analisis data selama dilapangan.

PEMBAHASAN

Pendidikan Menjadi Dasar Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan wahanabagipengembangan manusia. Pendidikan menjadi media bagi pemulihan kemanusiaan manusia yang tercermin dalam HMM dengan hakikat manusia, dimensi kemanusiaan dan pancadayanya itu. Pendidikan seperti ini dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia serta hanya terjadi didalam hubungan antarmanusia, (Prayitno, 2009 : 25).

Secara kuantitas jumlah penduduk tidak memberi dampak bagi kuatnya sebuah negara. Sebaliknya bila penduduknya sedikit namun berkualitas akan

meningkatkan harga diri negara tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 secara hakiki mengamanahkan agar pendidikan memanusiakan manusia. Dengan ringkas ini berarti pendidikan di satu pihak harus menjadi sumber kekuatan yang melawan proses *dehumanisasi*, di lain pihak menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan manusia mengembangkan segenap *fitra* dan potensiya sebagai makhluk yang mulia yang pada gilirannya menjadi dasar untuk membentuk bangsa besar yang mulia, (Surakhmat 2009 : 13).

Selanjutnya dikatakan pula bahwa UUD 1945 mengandung ideologi yang kuat yang memberikan cetak biru untuk melahirkan bangsa yang berbudaya. Ini berarti bahwa pendidikan harus mampu di satu pihak menjadi benteng yang kuat melawan *dekadensi* budaya dan *demoralisasi* peradaban bangsa di lain pihak menjadi *motivator* untuk bertumbuh dan berkembangnya kekayaan serta kekuatan budaya sebagai bentuk yang tinggi dari nilai etik, estetika, ilmu dan teknologi bangsa dalam arti seluas-luasnya.

Pada prinsipnya terdapat tiga aspek didalam istilah pendidikan yang saling mengisi yaitu usaha sadar dan terencana, memengaruhi atau menciptakan lingkungan yang menunjang pembelajaran, perubahan dan kemampuan diri, (Modouw, 2013 : 38-39).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, (Winarno, 2016 : 134). Menurut Laster dan Steward implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Nugroho (2014 : 657) menyebutkan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dijelaskan bahwa ada dua pilihan yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, *pertama* langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, *kedua*, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pulzl dan Treib (2015 : 129) memperkenalkan tiga generasi implementasi kebijakan yang dikenal dengan teori atas-bawah, bawah atas dan hibrida. Dijelaskan bahwa *Pertama*, model atas-bawah menekankan terutama pada kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang tegas dan pada pengendalian tahap implementasi. *Kedua* : model bawah-atas melihat birokrat lokal sebagai aktor utama dalam penyampaian kebijakan dan memenuhi implementasi sebagai proses negosiasi dalam jaringan pelaksana. *Ketiga*, teori hibrida mencoba mengatasi kesenjangan antara dua pendekatan tersebut dengan menggabungkan unsur-unsur model atas-bawah, bawah-atas dan model teoritis lainnya.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas, secara operasional kami simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan politik baik pada skala makro meso dan mikro yang diterjemahkan secara rinci kedalam sebuah arah kebijakan dan kemudian diturunkan menjadi visi-misi untuk dioperasionalkan oleh unit-unit dalam struktur birokrasi yang memiliki kewenangan, kemampuan, komitmen dan dukungan sumber daya yang memadai agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2004 : 3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Theresia dkk (2015 : 93), upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Menurut Theresa dkk pemberdayaan harus dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : *Pertama*, terarah artinya program pembangunan yang dirancang ditujukan langsung kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat mengatasi masalahnya. *Kedua* : kelompok sasaran dilibatkan secara aktif (partisipatif). *Ketiga* : menggunakan pendekatan kelompok. Artinya masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri-sendiri sehingga pendekatan kelompok paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Implementasi Kebijakan Pendidikan sebagai

Model Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu sindrom kemiskinan menurut Usman (2008 : 133) adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang diharapkan dapat memacu pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan tersebut usaha peningkatan ketrampilan teknis melalui ketrampilan kejuruan dan peningkatan keahlian (profesionalisme). Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui pendekatan perluasan sarana dan mutu pendidikan dalam semua sektor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun sayangnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi masih belum terjangkau oleh masyarakat umum. Menurut Usman jagad pendidikan kita masih tampak bagaikan kemasam barang *luxury* terlalu mewah.

Kebijakan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas pula. Berbagai model kebijakan pemberdayaan khususnya dalam bidang pendidikan tujuannya adalah mengekskelerasikan sistem pendidikan yang dianggap baku terutama penyesuaian dilakukan terhadap daerah-daerah tertentu yang memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu kegagalan pemerataan pendidikan di Indonesia adalah distribusi sumber daya yang tidak merata akases masyarakat terhadap sarana dan prasarana, kualitas institusi pendidikan, dan yang lebih penting adalah kualitas guru yang memadai. Bila dibuat perbandingan maka kualitas pendidikan di wilayah Barat Indonesia jauh lebih maju dari pada kualitas pendidikan di wilayah Indonseia Tengah

dan Timur. Ini diakibatkan oleh distribusi sumber daya mansuai khususnya kuslitas guru yang tidak merata, sarana dan prasarana pendidikan yang hanya terpusat di Jawa akses pembangunan yang memamng lebih terpusat di pulau Jawa karena secara geografis berhubungan langsung dengan pusat pemerintahan. Selain itu kebijakan otonomi dearah bahkan pada daerah-daerah tertentu dengan kebijakan otonomi khususnya termasuk Papua merupakan salah satu faktor terbentuknya tuntutan mainset asimetris bagi putra/putri daerah yang menjadikan daerah tersebut jauh lebih tertinggal karena dihuni oleh birokrat serta tenaga gurun yang tidak berkualitas karena faktor asimetris dimaksud.

Tabel 1. Implementasi Program P5 Kabupaten Jayapura Lima Tahun Pertama (2007-2011)

NO	TA	JUMLAH PENDAFTAR	LULUS		PROGRAM YG DIKUTI	JUMLAH YG BERHASIL	JUMLAH YG TIDAK LULUS/ MEMILIH PROGRAM YG LAIN	ALASAN TIDAK LULUS	LULUS DAN KULIAH DI DALAM NEGERI
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN					
1	2007	425 orang	26 orang	14 orang	Australia Languages Fondation	34 orang	3 orang	Tidak mampu	1 Orang
					1. Bachelor of Information Tekhnology pada RMIT University. 2. Strata satu pada Quesland University of Technology. 3. Bachelor of International Relations ast Australia National Unniversity, Bachelor of International Technology pada Swimburne University of Technology. 4. Bachelor of Art International Study University of Camberra. 5. Bachelor of Commerse University of Camberra. 6. Bachelor of Manajemen Deaking University. 7. Master of Planning Deaking Univrsity. 8. Diploma of Aviation at Tafe WA Perth. 9. Master of Public Administration pada Australian National University. 10. Master of Enggineering Victoria University International. 11. MIBT Diploma of Binsnis dan 12. Master of Commerse Deaking University International.	15	-	-	15 orang
2	2007	425 orang	26 orang	14 orang	Universitas Pelita Harapan Jakarta Indonesia a. S-2 Bidang Teknologi Pangan. b. S-2 Bidang Komunikasi c. S-1 Teknik Arsitektur d. S-1 Desain Interior e. S-1 Akuntansi f. S-1 Hubungan Internasional g. S-2 Pendidikan h. S-2 Manajemen i. S-2 Ilmu Komunikasi j. S-1 Ilmu Hukum k. S-1 Teknil Sijil l. S-1 Ilmu Administrasi	18 orang	10 orang	DO (Tidak Mampu)	8 orang
3	2008	160 orang	6 orang	11 orang	Kursus Bahasa Inggris di IALF Denpasar Bali	4 orang	11 orang	DO	-
4	2008	160 orang	6 orang	11 orang	Kuliah di Australia	4 orang	11 orang	DO	2 orang
5	2008	160 orang	6 orang	11 orang	Kursus Lanjutan	4 rang	11 Orang	DO	2 orang
					Program yang diikuti : a. Bachelor of International Development at La Trobe University Melbourne b. Bachelor of Humanitarian of Community Study at Charles Darwin University. c. Advan Diploma Tourisme Manajemen at La Troube University Melbourne dan Bachelor of Bisnis at La Trobe University Melbourne.				
6	2009	16 orang	1 orang	-	Adademi Militer (AKMIL)	1 orang	15 orang	Tidak Mampu	1 orang
7	2010	-	-	-	Akademi Kepolisian	-	-	-	-
8	2011	154 orang	75 orang	81 orang	Universitas Satya Wacana (UKWS) Salatiga	30 orang	124 orang	Tidak Mampu	30 orang

Sumber : www.tabloidjubi.com 2017 (diolah)

Tanggapan Pemerintah dan Kelompk Sasaran

Tanggapan Pemerintah

Tujuan Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri (P5) Kabupaten Jayapura ini sebagai salah satu program untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi putra-putri Papua asli Kabupaten Jayapura dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda usia produktif asli Kabupaten Jayapura yang potensial untuk melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Program ini juga untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, khususnya masyarakat asli Kabupaten Jayapura agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan wilayah sekaligus menjadi penggerak atau motivator kemandirian masyarakat, (Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayapura Maichel Wutoy).

Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Kabupaten Jayapura (P5) yang bersumber dari Dana Otsus 2013 akan dipusatkan untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Sektor pendidikan ini diantaranya untuk melanjutkan program P5 dimaksud. "Prinsipnya, kami akan terus mendukung program yang orientasinya berpihak kepada masyarakat, seperti pemberdayaan kampung, P5 dan sebagainya. Namun di masa kepemimpinan kami, terlebih dahulu kami akan lakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan, sejauh mana capaian-capaiannya. prinsipnya kita akan tetap memberikan dukungan guna meningkatkan SDM anak asli Kabupaten Jayapura", (Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw).

Selain itu Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan jaminan pekerjaan bagi putra-putri kenambati umbai yang melanjutkan kuliah melalui Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5). "yang dari salatiga sudah beberapa yang akan tamat dan akan kembali, dan itu kita perlu tenaga-tenaga IT dan akutansi. Dan ada beberapa yang tamat itu akan terserap karena kita membutuhkan tenaga itu. Bupati Mathius juga berencana akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Negara dan Aparatur Negara (Menpan) RI untuk formasi-formasi yang dibutuhkan supaya proses dibutuhkan supaya proses pengusulan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) supaya dapat dipercepat. "Harapannya supaya tenaga-tenaga ini dapat terserap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atas kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah ini. Sementara untuk mahasiswa yang dikirim ke Universitas Semen Indonesia, mereka akan langsung terserap dan bekerja dalam industri semen yang akan dibuka di Kabupaten Jayapura. Sementara mahasiswa yang dikirim ke STIKES Telegorejo semarang itu juga sama, ketika selesai langsung bekerja di Rumah Sakit Dian Harapan di Waena karena telah menandatangani kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura. Termasuk di perguruan tinggi Surya Institut, Universitas Gadjah Mada (UGM),

perguruan tinggi pariwisata di Bali, dimana setelah selesai tempat kerja sudah tersedia sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswa ini hanya serius dan fokus untuk belajar. "P5 saat ini kita batasi dengan jumlah yang ada dulu dan kita hanya memperkuat pada jurusan yang kita butuhkan seperti program investasi yang saat ini sedang kita kembangkan. Kita buka perikanan, perkebunan, semen, industri kayu sehingga pengiriman mahasiswa P5 harus disesuaikan dengan kebutuhan," jelasnya. Bupati menyadari bahwa saat ini jumlah PNS di kabupaten Jayapura terlalu banyak sehingga dengan membuka investasi masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Jayapura terlalu banyak sehingga dengan membuka investasi masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Jayapura,disisi akan menyerap tenaga kerja yang banyak. "Saya pikir juga pendidikan harus direncanakan dengan program-program strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini (Cenderawasih Pos, Kamis 3/9 2013).

Meskipun resim pemerintahan bergantian namun Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) tetap saja dilanjutkan ini berarti bahwa pemerintah sedang mensekusi pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura agar dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Keseriusan pemerintah Kabupaten Jayapura tidak saja nampak pada kelanjutan program P5 tersebut akan tetapi bagaimana mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Tanggapan Kelompok Sasaran

Implementasi Program P5 ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak, ada permintaan klarifikasi terkait implementasi program tersebut yang sarat politik dan ketidakjelasan soal perekrutan penempatan hingga pemulangan dengan alasan yang tidak jelas, tetapi ada pernyataan dukungan dari pihak-pihak yang merasakan manfaat program tersebut bagi pembangunan khususnya pengembangan SDM di Kabupaten Jayapura. Beberapa pernyataan tersebut dikutip dari berbagai sumber sebagai berikut :

"Tadi pagi kami tiba. Alasan kami pulang ini tidak jelas. Karena ketidakjelas ini, delapan peserta ini dari Bandara Sentani langsung menuju kantor Bupati Kabupaten Jayapura menghadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kami ketemu kepala BKD enggan memberi penjelasan. Ia janji kami ketemu, hari Rabu minggu depan," ujar mahasiswa semester dua, program studi Sastra Satu Pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kristen Satya Wacana (UKWS) ini. Pertemuan hari rabu nanti, delapan peserta ini akan mempertanyakan sejumlah kegagalan yang mereka temukan dalam surat keputusan bupati Jayapura atas pemulangan ini. Menurut peserta, surat Bupati Jayapura No.36 tahun 2013 tentang pemulangan 13 peserta P5 ini ada banyak kegagalan. Kegagalannya terdapat di alasan pelanggaran, tanpa tanda tangan kepala daerah dan kepala bagian hukum dan perundang-undangan yang mengeluarkan

surat ini tanpa cap. "Pelanggaran kami itu tahun lalu sudah selesai dengan sangsi, lalu sekarang diungkit lagi ini membuat kami heran,"katanya. Menurut dia peserta menduga, ada indikasi permainan oknum-oknum tertentu di pemerintahan daerah. "Ada ketidakadilan, ada permainan oknum-oknum tertentu di dalam demi kepentingan kantongnya,"katanya. Dengan alasan itu, para peserta ini tidak akan pernah menyerah menuntut haknya. "Kami berusaha sekuat mungkin bisa kembali kuliah,"ujar pria yang kuliah di UKSW Fakultas Bahasa Inggris dan Satra ini. Orang tua wali juga sangat mendukung harapan dari anak-anak mereka bisa kembali berkuliah. "Mereka harus kembali karena ada sejumlah keputusan yang tidak jelas. Bilang melanggar Ketentuan Peraturan Bupati Non 11 tahun 2008 namun tidak jelas poin mana yang di langgar,"kata Enggel Wally mewakili orang tua. Selain itu kata dia keputusan itu masih diragukan kebenarannya dan ada banyak keraguan muncul di tanda tangan dan cap. "Kop surat Bupati Jayapura namun, tidak ada bupati dan kepala bagian hukum dan perundang-undangan yang mengeluarkan itu hanya tanda-tangan tanpa cap berarti surat tidak resmi,"kata Enggel Wally.

Sementara itu pertanyaan dukungan dari beberapa pihak yang merespon kebijakan P5 ini sebagai solusi tepat untuk mewujudkan percepatan pembangunan terutama pengembangan SDM di wilayah Kabupaten Jayapura sebagaimana diungkapkan oleh Orang tua dari James I. Kreutha, Petrus Nasatekai dan Habel Klembiap yang berkesempatan mengikuti pendidikan Akademi Militer di Magelang :

Tanggapan masyarakat cukup beragam, ada yang mendukung tetapi ada juga yang merasa bahwa program ini sarat kepentingan dan ketidakjelasan terkait perekrutan hingga pemulangan mahasiswa dari perguruan tinggi tempat studi. Ini menunjukkan bahwa program P5 belum sepenuhnya memenuhi target dan keinginan masyarakat. Pemerintah Daerah secara berkala melakukan pengawasan terhadap kemajuan studi baik dalam dan luar negeri. Kemajuan studi tersebut dikomunikasikan kepada orang tua peserta program P5 beserta bukti-bukti rencana studi dan hasil studi berupa dokumen-dokumen autentik agar dapat dipertanggungjawabkan.

Kecakapan Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Pendukung

Kecakapan SDM

Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam rangka carry out Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri Kabupaten Jayapura atau lebih dikenal dengan Program P5 ini melibatkan dua pihak. Khusus untuk kelompok mahasiswa yang berkesempatan belajar ke luar negeri, setelah tahapan seleksi dilakukan dan mereka yang dinyatakan lulus diharuskan mengikuti khursus bahasa inggris di Lembaga Indonesia Australia Language Fondation (IALF) di Denpasar Bali selama tiga bulan. Lembaga

ini memiliki lisensi yang diakui secara international artinya selain manajemennya yang bagus SDM-nya pun yang sangat memadai. Peserta kursus tidak saja hanya belajar bahasa inggris melainkan diperkenalkan tentang gaya hidup budaya serta pola belajar di Negara tempat tujuan studi. Untuk mengukur kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM) ini tentunya mengacu pada tingkat penguasaan atau keberhasilan dari peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana disajikan pada table 3.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk memanfaatkan program P-5 ini cukup besar, namun yang berkesempatan belajar baik di dalam maupun di luar negeri (lulus seleksi) sangat kecil. Tahun pertama (2007) peserta yang mendaftar berjumlah, 425 dan yang dinyatakan lulus hanya 34 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Jumlah ini disaring sehingga yang berkesempatan belajar di Australia hanya berjumlah 15 orang.

Tahun 2008 peserta yang mendaftar berjumlah 160 orang, dan yang dinyatakan lulus berjumlah 17 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 11 perempuan. Tahun 2009 program P-5 ini tidak saja memberi peluang untuk masyarakat Kabupaten Jayapura memilih kuliah di universitas regular, tetapi sekolah berbasis kedinasan pun ditawarkan, sebanyak 16 orang mengaduh nasib di sekolah kedinasan militer (Akademi Militer) namun yang berhasil hanya 1 orang. Sedangkan tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Jayapura membuka peluang di Akademi Kepolisian namun sepi peminat. Tahun 2011 kembali 156 orang mendaftar dengan universitas aviliasi UKSW. Yang dinyatakan lulus berjumlah 30 orang dan sisanya dinyatakan gugur.

Dengan melihat prosentase ketidakkulusan peserta didik yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa kualitas guru pada jenjang sebelumnya (SMP dan SMA/SMK) perlu mendapatkan perhatian serius. Program P-5 disisi lain cukup berhasil memanfaatkan dana Otonomi Khusus secara baik namun dilain pihak pendidikan menengah yang notabene menjadi dasar mempersiapkan peserta didik untuk megikuti program P-5 tersebut terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura gagal membangun pola atau sinkronisasi antara sekolah-sekolah menengah atas (SMA/SMK) dengan Program P-5 yang bermuara pada peningkatan kualitas guru agar kualitas peserta didik yang nantinya disiapkan untuk *mencarry out* program P-5 ini terbangun secara berkesinambungan dan hasilnya pun maksimal.

Sumber Daya Pendukung

Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri Kabupaten Jayapura (P-5) lima tahun pertama bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 39.726.415.381,- dirincikan pada tabel 2

Tabel 2. Besaran Dana dan Sumber dana Tujuan Kampus Program P5 Kab. Jayapura
5 Tahun Periode Pertama

NO	TAHUN	BESARAN DANA	SUMBER DANA	PROGRAM YG DIDANAI
1	2007	Rp. 3.907.000.000,-	DANA OTONOMI KHUSUS	Australia Language Fondation dan beasiswa Beberapa Universitas di Australia.
2	2008	Rp. 5.500.000.000,-		Kursus di IALF Denpasar Bali dan Beberapa Universitas di Bali
3	2009	Rp. 8.368.212.500,-		Akademi Militer dan Beberapa Program Studi di UKSW
4	2010	Rp. 9.721.498.000,-		Program Studi di UKSW
5	2011	Rp. 12.229.704.881,-		Program Studi di UKSW
	TOTAL	Rp. 39.726.415.381,-		

Sumber : tabloidjubi.com 2017 (diolah)

Alokasi dana Otonomi khusus dalam rangka pembiayaan Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri Kabupaten Jayapura (P-5) cenderung meningkat. Tahun 2007 – 2008 prosentasi dana Otsus dari total anggaran sebesar 9,83% atau 4,01%, tahun 2008 – 2009 selisihnya menjadi 13,84% atau naik sekitar 7,22%, pada tahun 2009 – 2010 selisihnya menjadi 21,06% atau naik sekitar 3,41%, pada tahun 2010 – 2011 selisihnya menjadi 24,47% atau naik sekitar 6,31%.

Melihat adanya kecenderungan peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk membiayai Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri Kabupaten Jayapura (P-5) ini berarti bahwa dari segi penggunaan anggaran cukup terserap dengan baik. Begitu pula dengan keseriusan Pemerintah Daerah dalam melanjutkan program ini, namun dengan adanya penyerapan anggaran yang baik ini apakah diimbangi pula dengan hasil yang maksimal ?, pertanyaan inilah yang perlu ditelusuri dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia terutama Tenaga Guru dan juga birokrat yang memahami dengan baik pentingnya program ini bagi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Kesediaan Implementor

Dengan melihat kelanjutan program ini pada lima tahun pertama dan tengah berjalan pada lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura cukup serius dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia di kabupaten ini. Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri Kabupaten Jayapura (P-5) merupakan program lanjutan sepeninggalan Bupati Habel Melkias Suwae, yang kemudian dilanjutkan oleh Matius Awaitouw Bupati terpilih pada periode berikutnya.

Keseriusan dalam menangani program ini tidak saja didukung oleh bupati namun semua komponen daerah baik legislatif maupun birokrasi sebagai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayapura Maichel Wutoy menuturkan : *“Tujuan P5 ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi putra-putri Papua asli Kabupaten Jayapura dengan memberikan*

kesempatan kepada generasi muda usia produktif maupun PND asli Kabupaten Jayapura yang potensial untuk melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. “P5 ini juga untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, khususnya masyarakat asli Kabupaten Jayapura agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan wilayah sekaligus menjadi penggerak atau motivator kemandirian masyarakat.”

Meskipun dukungan dan kesediaan implementor dalam mem-bake-up Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Kabupaten Jayapura (P-5) ini cukup baik namun ada beberapa hal yang perlu evaluasi dan ditindaklanjuti, pada Tahun 2007 silam, Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan kerja sama dengan PKP2A LAN Makassar untuk melaksanakan penjarangan putra-putri Papua asli Kabupaten Jayapura yang akan menjalani pendidikan di dalam dan Luar Negeri. Kebijakan tersebut merupakan cikal-bakal program yang dikenal dengan Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-putri Papua (P5) Kabupaten Jayapura saat ini.

Dengan keterlibatan PKP2A LAN Makasar sebagai partner dalam meyeleksi peserta tes dimaksud menunjukkan bahwa ketidaksiapan pemerintah daerah terkait kapasitas aparatur yang berkompeten dalam hal tersebut. Disamping itu keterlibatan tersebut mendiskreditkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat (Universitas Cenderawasih, Universitas Negeri Papua dan Universitas Musamus). Berbagai hal menjadi pertimbangan pemerintah daerah saat program P-5 diimpelentasikan dan yang menjadi hal utama adalah universitas aviliasi dimana peserta didik akan dikirim. Universitas Cenderawasih, Universitas Negeri Papua dan Universitas Musamus tidak menjadi perguruan tinggi aviliasi karena faktor kualitas manajemen dan staf pengajar yang dianggap kurang layak atau tidak menjawab persoalan. Hal tersebut memang diakui, namun disisi lain program P-5 tersebut justru melemahkan institusi pendidikan di papua apalagi program tersebut didanai oleh Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kesesuaian Birokrasi Penyelenggara

Program P-5 di kendalikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini jelas terdapat kejanggalan dalam hal tugas pokok dan fungsi dari OPD tersebut. Seharusnya program P-5 ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Pengajaran karena disinkronkan dengan kebutuhan peserta didik saat penjurangan dilakukan. Selain itu dengan adanya tanggung jawab tersebut, Dinas Pendidikan dan Pengajaran merasa bertanggung jawab dalam hal peningkatan kualitas guru karena keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas guru yang menjadi tolak ukur keberhasilan peserta didik untuk mengikuti program P-5 dimaksud.

PENUTUP

Kesimpulan

Meskipun resim pemerintahan bergantian namun Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) tetap saja dilanjutkan ini berarti bahwa pemerintah sedang menseseriusi pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura agar dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Keseriusan pemerintah Kabupaten Jayapura tidak saja nampak pada kelanjutan program P5 tersebut namun bagaimana mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Implementasi Program P5 ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak, ada permintaan klarifikasi terkait implementasi program tersebut yang sarat politik dan ketidakjelasan soal perekrutan penempatan hingga pemulangan dengan alasan yang tidak jelas, tetapi ada pernyataan dukungan dari pihak-pihak yang merasakan manfaat program tersebut bagi pembangunan khususnya pengembangan SDM di Kabupaten Jayapura.

Dengan keterlibatan PKP2A LAN Makasar dan beberapa perguruan tinggi di luar Papua sebagai partner dalam dalam meyeleksi peserta tes dimaksud menunjukkan bahwa ketidaksiapan pemerintah daerah terkait kapasitas aparatur yang berkompeten dalam hal tersebut.

Organisasi penyelenggara program P5 ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura keliru dalam menganalisis tugas pokok dan fungsi OPD yang ditunjuk bertanggung jawab mengimplementasikan Program P5 dimaksud.

Rekomendasi

Dukungan pemerintah terhadap Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) lebih serius mempersiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura dengan program-program yang lebih menjanjikan agar lulusan tersebut bukan saja bersaing namun mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Tanggapan beragam dari berbagai pihak, terutama terkait ketidakjelasan soal perekrutan penempatan hingga pemulangan dengan alasan yang tidak jelas, seharusnya menjadi bahan evaluasi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dapat melakukan proses ini secara transparan tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura perlu melibatkan UNCEN, UNIPA dan MUSAMUS dan beberapa perguruan aviliasi dalam hal perekrutan dan penempatan mahasiswa. Program P5 ini seharusnya dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagai OPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDM peserta didik karena antara Program P5 dimaksud dengan memiliki keterkaitan kualitas guru dan kualitas guru menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Kendi, Kristofol Ibrahim, 2016, Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua, Yayasan Emereuw Sentani Papua.
- Modouw James, 2013, Pendidikan dan Peradaban Papua, Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial, Bajawa Press Yogyakarta.
- Nugroho Riant, 2014, Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan (Edisi Ke 5), Alex Media, Komputindo Gramedia, Jakarta.
-, 2013, Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Paul Bobenz Mark dan Kuipers Saneke Hart T, 2015, Politik Evaluasi Kebijakan, Dalam Michel Moran, Marthin Rein dan Robert E. Goodin : Handbook Kebijakan Publik, (*Handbook of Public Policy*), Nusa Media Bandung.
- Pulzl Helga dan Treib Oliver, 2015, Implentasi Kebijakan Publik, Dalam Ficher Frank, Miller J. Gerald dan Sidney S. Mara : Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori Politik dan Metode (*Handbook of Public Policy, Politic and Methods*), Nusa Media Bandung.
- Winarno Budi, 2016, Kebijakan Publik di Era Globalisasi, Teori dan Proses, Studi Kasus Komparatif, CAPS, Yogyakarta.